

**PENGENDALIAN INTERN MELALUI VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN
SOSIAL DAN HIBAH DENGAN E-BANTU SOHIB
(ELEKTRONIK BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen**

Oleh:

Andrean Mei Lauda

NIM.22102081043



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PASCASARJANA
MALANG
2024**

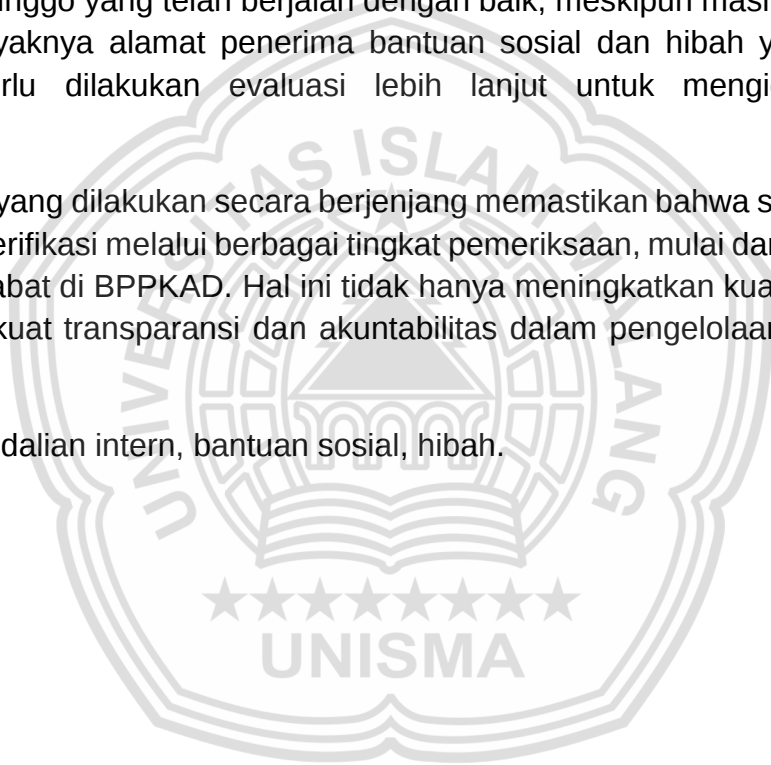
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian intern melalui validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan e-bantu sohib (elektronik bantuan sosial dan hibah). Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus (*case study research*).

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa validasi data secara manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah. Melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah di Kota Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah yang tidak lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya.

Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan bahwa setiap data yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari operator di SKPD hingga pejabat di BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah.

Kata Kunci: pengendalian intern, bantuan sosial, hibah.



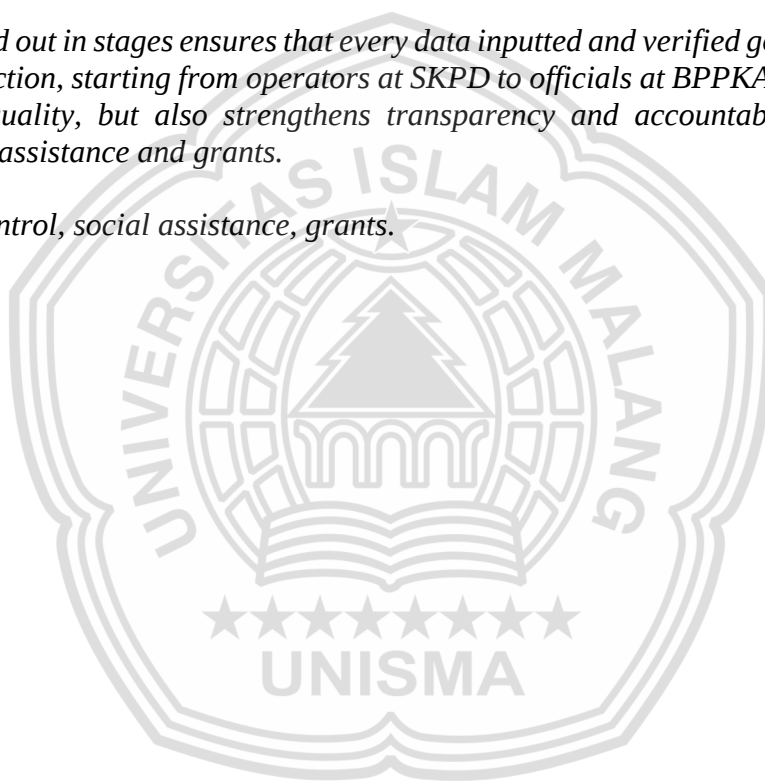
ABSTRACT

This research aims to describe internal control through validating data on recipients of social assistance and grants with e-help sohib (electronic social assistance and grants). The research design in this study uses a qualitative case study method (case study research).

Based on the results of data analysis, it shows that manual data validation carried out by BPPKAD Probolinggo by comparing data from Regional Work Units (SKPD) with data in the Regional Development Information System (SIPD) is an important process to ensure the accuracy and suitability of data on recipients of social assistance and grants . Through standard operating procedures (SOP) in managing data on recipients of social assistance and grants in Probolinggo City which has been running well, although there are still obstacles related to the incomplete addresses of many recipients of social assistance and grants, it is necessary to carry out further evaluation to identify the cause.

Data validation carried out in stages ensures that every data inputted and verified goes through various levels of inspection, starting from operators at SKPD to officials at BPPKAD. This not only improves data quality, but also strengthens transparency and accountability in the management of social assistance and grants.

Keywords: internal control, social assistance, grants.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk menjamin kesejahteraan dari setiap penduduknya. Kesejahteraan tersebut akan memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Tolak ukur kesejahteraan salah satunya dapat di ukur dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, rumah yang layak huni, kebutuhan akan makanan dan minuman, dan lain sebagainya.

Selain dari kesejahteraan, kemiskinan juga perlu untuk dijamin agar dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya berbagai upaya yang telah dilakukan negara dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas angka kemiskinan. Cara yang dilakukan seperti melakukan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan.

Bantuan sosial yang di berikan pemerintah bukanlah hal yang baru dilakukan kepada masyarakat (Rahmansyah et al, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung ataupun tidak memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan penyedia

pelayanan sosial dan penyaluran bantuan keuangan menurut Habibulah (2010).

Kebijakan yang menyangkut kesejahteraan yang meliputi kualitas hidup dan mengarahkan pada pemberian pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Retnaningsih, 2020). Upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian beragam bantuan berupa pelayanan dan program subsidi sosial. Dalam penyaluran tersebut memerlukan data penerima bantuan sosial, yang mana data tersebut diperoleh dari sistem pusat.

Pada sistem masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial adalah masyarakat menengah kebawah atau dalam kategori miskin, tetapi ada kesalahan pada saat menginput yang menjadikan data penerima bantuan sosial masyarakat campuran yaitu masyarakat yang terbilang cukup mampu. Hal tersebut menjadikannya bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi di yakini juga dapat membantu kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pada pelayanan publik dan pemerintah.

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya.

Serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah pada system pengelolaan daerah atau SIPD terjadi kerugian dari pihak intern pemerintah karena data tidak valid dengan semestinya. Diketahui bahwa penganggaran belanja bantuan sosial masih ditemukan permasalahan, yaitu sebagian daftar penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi alamat penerima. Dari 10.405 daftar penerima bantuan sosial ada sekitar 2.042 data penerima yang belum lengkap alamatnya. Kurang cermatnya pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam menyusun RKA APBD, Kurangnya perhatian pejabat penyusun anggaran di SKPD dalam mengusulkan standar satuan harga dimana mereka mengusulkan standar satuan harga pada akhir waktu input Renja sehingga menyebabkan lambatnya input renja, dan kurang cermatnya PPTK dalam memilih kode rekening belanja sehingga menyebabkan kesalahan dalam memilih kode rekening. Serta tidak samanya rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Berdasarkan hasil monitoring pada bantuan berupa hibah dan bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Probolinggo, terdapat beberapa permasalahan terkait penganggaran belanja bantuan sosial. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah sebagian daftar

penerima bantuan sosial masih belum dilengkapi dengan alamat penerima. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan data penerima bantuan social dan hibah

Permasalahan	Jumlah
Alamat ditulis nol (0)	3
Alamat ditulis titik (.)	1
Alamat ditulis tanda tanya (?)	7
Alamat ditulis NIK	33
Alamat ditulis nama kelurahan saja	1977
Tidak ditulis alamat	21

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait system pengendalian dan informasi validasi data bantuan social dan hibah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi JASMAS memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kurangnya kontrol dalam penyesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah (SPJ). Nurwani (2018) menunjukkan hasil terdapat kelemahan dalam dua unsur kegiatan pengendalian, yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Pada unsur pemantauan juga terdapat kelemahan dalam dua sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

Julianto (2021) memberikan hasil jika Aplikasi pengelolaan data bantuan sosial di kelurahan argasunya adalah aplikasi yang membantu menyelesaikan masalah dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, mempermudah dalam proses pencarian data masyarakat, membantu pihak kelurahan argasunya dalam penyimpanan data masyarakat. Penelitian lain Manoppo (2022) menunjukkan hasil bahwa

Strategi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih terdapat kendala seperti keluarga yang sebenarnya mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya. Ratnasari (2022) menjelaskan Sistem Informasi Penajuan Bantuan Sosial berbasis web dapat diimplementasikan sebagai media pengaduan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Utama (2016) mengatakan bahwa validasi mengacu pada suatu kebenaran atau proposisi yang dihasilkan oleh penelitian. Anggraini (2017:14) mengatakan informasi adalah informasi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dan ketidakpastian dalam keputusan situasi. Sistem pengendalian pada validasi data diperlukan untuk setiap pengelolaan informasi terutama pada data penerima bantuan sosial dan hibah yang telah peneliti lakukan.

Penerapan *E-Government* dalam rangka mewujudkan *Smart Government* merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemerintahan secara keseluruhan (Sari, 2022). Menurut Said (2007) inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau

pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. inovasi tidak hanya terkait dengan pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan baru saja. Inovasi juga mencakup perubahan dalam lingkup yang lebih luas, seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu organisasi.

Melihat permasalahan yang dihadapi tersebut peneliti berencana akan membuat langkah inovasi melalui penyusunan Aplikasi E-Bantu Sohib. Aplikasi ini menyediakan data penerima bantuan sosial dan hibah mulai dari proposal, nama, alamat hingga nominal anggarannya. Selain itu, alasan dari peneliti mengambil topik terkait pengendalian intern pada validasi data penerima bantuan sosial dan hibah ini sebagai pengembangan pada proses validasi data bantuan sosial dan hibah melalui aplikasi baru yaitu E-Sohib. Dengan pengembangan ini di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan Probolinggo. Pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian intern agar tidak terjadi kerugian kembali dan penerima bantuan sosial dan hibah dapat tersalurkan dengan baik serta sesuai dengan data penerimanya.

Menyikapi hal tersebut, pengembangan pengendalian ini agar dapat mensejahterakan penerima bantuan sosial dan hibah agar berjalan dengan lancar. Serta dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dengan teliti, dan cepat. Sehingga baik dari penerima bantuan sosial dan hibah dapat

tersampaikan dengan tepat maupun dari pihak aparat pemerintah juga dapat menyusun laporan terkait bantuan social dan hibah dengan baik dan benar. Pejabat penyusun anggaran pada SKPD dan penginput renja juga dapat mengevaluasi dari data-data usulan yang di lampirkan untuk dapat diproses dengan cermat dan tepat agar tidak terjadi penyimpangan lagi pada rekap belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lampiran Penjabaran APBD dengan Ringkasan APBD.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengendalian Intern melalui Validasi Data Penerima Bantuan Sosial dan Hibah Dengan e-Bantu Sohib (Elektronik Bantuan Sosial Dan Hibah)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka focus penelitian dari permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib dapat meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo?
2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial?
3. Bagaimana evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses penerima bantuan sosial dan hibah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi validasi data penerima bantuan sosial dan hibah dengan menggunakan E-bantu Sohib yang dapat meningkatkan efisien pengendalian intern di BPKAD Probolinggo.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan validasi data melalui E-bantu Sohib dalam pengendalian intern di konteks penerima bantuan social dan Bantuan Sosial.
3. Untuk menganalisis evaluasi efektivitas pengendalian intern setelah menerapkan system validasi data dengan E-bantu Sohib pada proses penerima bantuan sosial dan hibah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan validasi data penerima bantuan social dan hibah dengan e- bantu sohib.

2. Bagi Pascasarjana / Universitas

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sebagai sumbangan informasi yang dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Hibah.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai Informasi terkait penerimaan bantuan sosial dan hibah kepada pihak yang menerima bantuan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa validasi data secara manual yang dilakukan oleh BPPKAD Probolinggo dengan membandingkan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan data di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan proses penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data penerima bantuan sosial dan hibah. Melalui standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial dan hibah di Kota Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala terkait banyaknya alamat penerima bantuan sosial dan hibah yang tidak lengkap, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya. Ketidaklengkapan alamat pada daftar penerima bantuan sosial ini dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan Aplikasi e-Bantu Sohib. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan rekapitulasi data daftar penerima bantuan sosial dan hibah, data ini merupakan sumber data dalam penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Hibah. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan

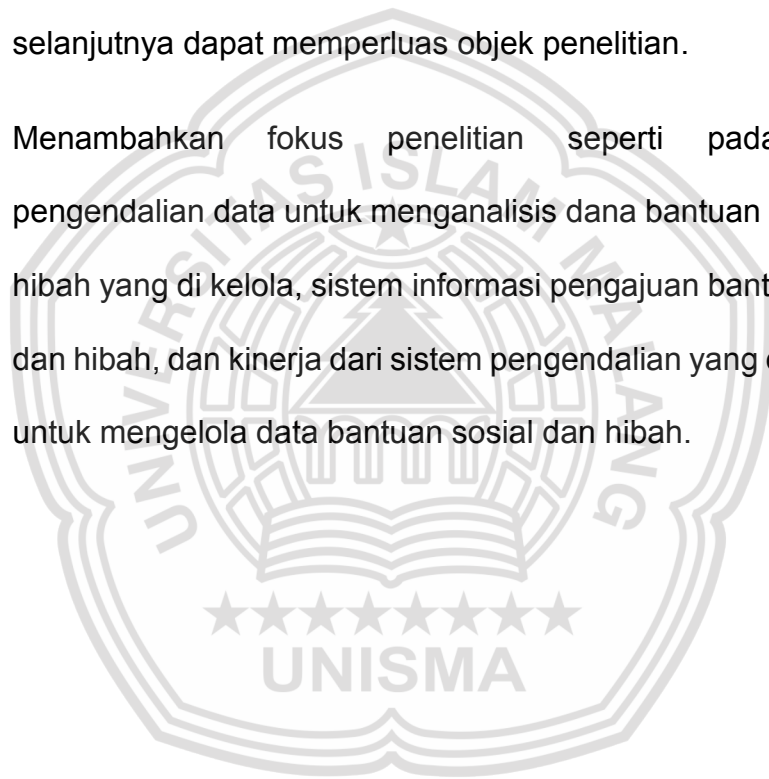
pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang tujuan pentingnya sebagai upaya modernisasi dan transformasi pelayanan public.

Validasi data yang dilakukan secara berjenjang memastikan bahwa setiap data yang diinput dan diverifikasi melalui berbagai tingkat pemeriksaan, mulai dari operator di SKPD hingga pejabat di BPPKAD. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah. Serta keberhasilan dalam proses validasi data di BPPKAD Kota Probolinggo sangat bergantung pada peran serta komitmen dari berbagai pihak yang terlibat, terutama operator di SKPD teknis dan pimpinan SKPD. Dengan memperkuat peran dan komitmen operator dan pimpinan SKPD, serta mendukung mereka dengan pelatihan, penghargaan, komunikasi yang baik, dan teknologi yang tepat, BPPKAD Kota Probolinggo dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam validasi data bansos dan hibah.

6.2 Saran

Beberapa keterbatasan dapat mempengaruhi hasil penelitian dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Menambahkan sampel penelitian, dalam penelitian ini hanya pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian.
2. Menambahkan fokus penelitian seperti pada sistem pengendalian data untuk menganalisis dana bantuan sosial dan hibah yang di kelola, sistem informasi pengajuan bantuan sosial dan hibah, dan kinerja dari sistem pengendalian yang digunakan untuk mengelola data bantuan sosial dan hibah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi. (2019). Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali. *Jurnal AL-YASINI* Volume 04. No.02 PISSN:2527-3175 E-ISSN:2527-6603. Hal.124 22
- Abdurrrahman. (1992) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- A Chariri dan Imam Ghozali. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ahmad, Lukman dan Munawir. (2018). *Sistem Informasi Manajemen (1st ed.)*. Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh.
- Andi Tahir Hamid. (1996). *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm 72
- Anggraeni, Elisabet & Rina I. &. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 98-115.
- Anas, A. (2021). Transformasi Bantuan Sosial Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 264-265.
- Amundsen, I. (2020). COVID-19, Cash Transfers and Corruption.
- Atyanto Mahatmyo. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*.
- Azhar Susanto. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi-Struktur-Pengendalian-ResikoPengembangan*. Cetakan Pertama. Bandung : Lingga Jaya.
- Barkah, A. D., & Nasutin, J. (2022). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Prsedur Hibah pada Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 196-204.
- Bande, M. (2020). Why Cash Transfers Are an Efficient Method of Reducing Food Insecurity. *The Elephant*.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Creswell, J. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New York: Pearson.
- Habibullah. (2010). Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. *Sosiokonsepia: Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Hall, J. A. (2001). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, R. H. (2018). Implementasi Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Pontianak. *MAKSI UNTAN*, 4(1).
- Julianto, J. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Bantuan Sosial. *Jurnal data Science & Informatika*, 1(2), 71-76.
- Lathifah, N., & Yudha, A. T. R. C. (2018, October). Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, pp. 1209-1233).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170-178.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen Vol*, 4(1), 25-39.
- Mardani. (2014). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 129-130
- Marrus, Stephani K. (2002). Desain Penelitian Manajemen Strategik. Rajawali Press. Jakarta
- McLeod Jr, Raymond. and George Schell. (2008). Management Information Systems.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, F. A. (2022). Implementasi Qr Code Menggunakan Google Api Dalam Membangun Sistem Informasi E-Bansos Menggunakan Metode Extreme Programming (Studi Kasus: Kelurahan

Batujaya). *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, 1(07), 1045-1050.

Nurwani, N. (2018). Analisis sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan belanja bantuan sosial di dinas sosial Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 31-38.

Oktavia, Siska dan Saharuddin. (2013). "Hubungan Peran Stakeholder denganPartisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor" : *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 1, No.3: 231-246.

Prakarsa. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta (Issue April, pp. 1–4). Prakarsa

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian GHibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bnatuan Sosial

Purnia, D. S., Rahmatullah, S., & Rifai, A. (2019). Pengembangan implementasi aplikasi bantuan sosial berbasis mobile pada dinas sosial. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 490813.

Putri, S. (2019). *Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Pratama Jakarta Cakung Dua* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk

penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.

Rahayu, Sri Lestari. (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

Ramaputra, F. A. (2022). Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial Berbasis Web. *Syntax*, 11(02), 34-45.

Retnaningsih, (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215-227.

Rizki, F., Andika, T. H., & Salimu, S. A. (2022). Penggunaan Data Mining Sebagai Pengambilan Keputusan Penerimaan Bantuan Terhadap Rumah Ibadah (Studi Kasus: Rumah Ibadah di Kabupaten Tanggamus). *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (AJIEE)*, 4(1), 55-65.

Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press. Hal 27

Sari, I. K., Said, M. M. U., & Rahmawati, S. D. (2022). Penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19. *Respon Publik*, 16(10), 40-51.

Sri Lestari Rahayu, (2012). *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media), 2.

Sugiyono, P.J.A. (2011) Bandung, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta. Sugiyono, Bandung.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Susanto, I. (2019). *Analisis Fishbone (Ishikawa Diagram)*, Jurnal ITS

Sutabri, Tata, S.Kom, MM. (2003). *Analisis Sistem Informasi*, Jakarta . Andi Offset.

Sutama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media.

Tague, N. R. (2005) *The Quality Toolbox, Second Edition. Edited by P. O'Mara. Milwaukee: American Society for Quality (ASQ) Quality Press.*

Tenth Edition. Upper Saddle River: Pearson Education Setiadi, Nugroho J. (2013). *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Trisnawati, N. (2017). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang. *Jurnal Paradigma (JP)*, 5(1), 11-20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Yin, Robert K. (2014). Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuvita. (2020). Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan eISSN : 2686536X | pISSN : 2503-3794. Hal 63

Waryanti. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1 Akuntansi UNDIP.

